

DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU (ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN DAN INDEKS WILIAMSON)

Darwis Amin Rahawarin

Abstract

This study aims to determine the position of economic growth of each regency / city in Maluku Province based on economic growth and Gross Domestic Product (GDP) per capita and to determine the imbalance of economic growth between regencies / cities in Maluku Province. This research conduct with Klassen Typology analysis and Williamson's Index analysis approach method. Research showed that regency/city that have significant growth in economic level per capita and gross domestic product (GDP) are Ambon City, and Tual City. The regency/city that have minimal growth in economic level per capita and GDP are Maluku Tengah Regency, Buru Regency, Seram Bagian Barat Regency and Buru Selatan Regency. Disparity in economic development in Maluku Province is quite significant although income inequality in most regions is quite low because it has a relatively high level of economic growth and per capita income above the Maluku Province average.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tipologi klassen dan Indeks Williamson's. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita dan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi antara lain adalah Kota Ambon, dan Kota Tual, sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita dan laju PDRB yang rendah antara lain adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan. Disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku cukup signifikan walaupun ketimpangan pendapatan sebagian besar daerah cukup rendah karena memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang relatif tinggi di atas rata-rata Provinsi Maluku.

Keywords: Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Disparitas Pembangunan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (*disparity*). Namun dengan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun

lembaga institusi yang mendukung. Menurut Perroux sebagaimana dikutip Arsyad (1999), sebab pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Dari hal tersebut, pembangunan tidak jarang dapat menimbulkan adanya ketimpangan.

Disparitas perekonomian antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada daerah masing-masing. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Tingginya suatu disparitas tidak hanya menciptakan ketegangan sosial (*social strain*) tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan disparitas pembangunan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2003).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah juga bisa berbeda atau bervariasi dari satu sama lain. Ini telah membuat beberapa wilayah dapat dikenal sebagai wilayah yang tumbuh cepat, wilayah yang tumbuh lambat, sedangkan wilayah lain memiliki pertumbuhan yang stagnan. Variasi tingkat pertumbuhan antar wilayah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jumlah dan kapasitas penduduk, potensi sumber daya alam, ketersediaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas, perbedaan karakteristik wilayah, pengembangan kemampuan suatu daerah, kemudahan pengembangan, dan lain-lain (Adisasmita, 2009).

Menurut Sjafrizal dalam Dhyatmika dan Atmanti (2013), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan mobilitas barang dan jasa. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*).

Maluku sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia tidak mungkin terlepas dari masalah ketimpangan perekonomian. Provinsi Maluku yang terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten/kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan-persoalan penting yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pembangunan. Aspek pemerataan pembangunan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

Tabel 1
PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018
(Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	980.553,76	1.050.740,66	1.127.428,53	1.185.488,64	1.257.048,33	1.338.342,62	1.417.195,93	1.500.690,78	1.591.855,76
2	Kab. Maluku Tenggara	1.166.818,03	1.236.580,43	1.323.969,14	1.401.850,38	1.489.477,13	1.570.944,96	1.660.713,31	1.758.913,37	1.863.697,09
3	Kabupaten Maluku Tengah	3.532.297,12	3.723.093,82	3.980.225,40	4.157.895,97	4.431.594,98	4.666.260,72	4.943.327,53	5.230.454,66	5.541.076,92
4	Kabupaten Buru	954.861,00	1.006.765,86	1.061.575,49	1.108.482,91	1.177.518,67	1.239.094,91	1.309.986,99	1.388.750,57	1.475.062,75
5	Kabupaten Kep. Aru	1.348.409,05	1.419.144,63	1.530.370,68	1.620.310,39	1.731.216,09	1.821.139,26	1.916.829,33	2.030.356,56	2.153.277,79
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.191.718,35	1.261.644,33	1.342.284,18	1.403.352,79	1.489.762,52	1.573.110,75	1.660.761,37	1.758.399,85	1.863.089,51
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.319.256,02	1.431.888,87	1.488.346,93	1.535.231,70	1.664.845,23	1.760.134,30	1.848.628,38	1.910.392,58	1.917.693,54
8	Kab. Maluku Barat Daya	607.040,67	641.342,34	689.175,70	727.819,65	839.531,24	841.626,99	892.498,54	946.841,67	1.004.857,31
9	Kabupaten Buru Selatan	536.043,18	560.886,95	590.025,26	621.698,12	660.759,68	705.279,31	748.856,83	794.736,22	842.548,76
10	Kota Ambon	5.911.770,17	6.333.577,03	6.861.334,95	7.277.366,87	7.711.194,36	8.210.004,37	8.715.003,73	9.252.475,16	9.826.713,81
11	Kota Tual	879.817,21	931.725,22	1.005.342,55	1.064.640,30	1.132.120,49	1.195.770,13	1.265.188,47	1.337.783,92	1.417.789,54
	Provinsi Maluku	18.428.584,56	19.597.390,14	21.000.078,81	22.104.137,72	23.585.068,72	24.921.708,32	26.378.990,41	27.909.795,34	29.497.662,78

Sumber: Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019

Seperti yang terlihat pada tabel bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan jumlah PDRB dari masing-masing kabupaten/kota. Dari 11 kabupaten/kota tersebut Kabupaten Buru Selatan memiliki PDRB yang terendah diikuti oleh Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual, jika dibandingkan dengan PDRB kabupaten/kota lainnya. Perbedaan PDRB yang signifikan ini disebabkan karena potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Metode

Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait dimana data yang diperlukan antara lain data berupa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)/kapita masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan data laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Adapun

analisis data yang digunakan adalah Analisis Tipologi Klassen dan Analisis Indeks Williamson.

Analisis Tipologi Klassen adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (H. Aswandi dan Mudrajat Kuncoro, 2002).

Kriteria yang digunakan terdiri dari empat ; a) Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Maluku. b) Kuadran II (kedua), yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku. c). Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku, dan d). kuadran IV (keempat) adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku (tabel 2).

Tabel 2
Kuadran Tipologi Klassen

PDRB Per Kapita Pertumbuhan Ekonomi	$Y_{ij} > Y_j$	$Y_{ij} < Y_j$
$R_{ij} > R_j$	Pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita tinggi (i)	Pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita rendah (iii)
$R_{ij} < R_j$	Pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita tinggi (ii)	Pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita rendah (iv)

Keterangan:

R_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi.

R_j = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi.

Y_{ij} = Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi.

Y_j = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi (Prasetyo dkk: 2008).

Menurut Sjafrizal (2012) salah satu model lain yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson yang dikemukakan oleh Williamson. Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Formulasi Indeks Williamson yang digunakan menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

Dimana :

V_w = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi

f_i = Jumlah penduduk kabupaten i

n = Jumlah penduduk di provinsi

Dengan indikasi bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati 0 (nol) maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil (merata) dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol (mendekati 1) maka menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Hasil

Pada tabel 3 terlihat bahwa selama tahun 2010-2018 rata-rata PDRB per kapita Provinsi Maluku adalah sebesar 14,24 di tahun 2018. Daerah yang tertinggi di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kep. Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Kota Tual. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Maluku sangat berfluktuasi sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel 4.

Untuk tujuan penelitian, maka daerah digolongkan berdasarkan empat klasifikasi. Pertama, pertumbuhan tinggi dan daerah berpenghasilan tinggi adalah daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih

tinggi daripada Provinsi Maluku. Kedua, pendapatan tinggi tetapi wilayah pertumbuhan rendah adalah daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada Provinsi Maluku. Ketiga, pertumbuhan tinggi tetapi daerah berpenghasilan rendah adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi pendapatannya lebih rendah daripada Provinsi Maluku. Keempat, pertumbuhan rendah dan daerah berpenghasilan rendah adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih rendah dari Provinsi Maluku.

Tabel 3
PDRB Per Kapita Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018
(Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun									Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	9,27	9,84	10,46	10,91	11,47	12,12	12,76	13,42	14,16	11,60
2	Kab. Maluku Tenggara	12,04	12,71	13,53	14,29	15,13	15,92	16,76	17,72	18,71	15,20
3	Kabupaten Maluku Tengah	9,73	10,20	10,87	11,32	12,03	12,63	13,34	14,08	14,87	12,12
4	Kabupaten Buru	8,74	8,93	9,11	9,22	9,49	9,69	9,94	10,23	10,56	9,55
5	Kabupaten Kep. Aru	15,93	16,50	17,51	18,26	19,24	19,95	20,71	21,65	22,66	19,16
6	Kab. Seram Bagian Barat	7,21	7,58	8,02	8,35	8,82	9,28	9,77	10,31	10,90	8,92
7	Kab. Seram Bagian Timur	13,25	14,12	14,42	14,63	15,60	16,24	16,80	17,12	16,94	15,46
8	Kab. Maluku Barat Daya	8,55	9,03	9,63	10,15	11,66	11,64	12,31	13,03	13,80	11,09
9	Kabupaten Buru Selatan	9,93	10,18	10,52	10,87	11,35	11,90	12,41	12,96	13,53	11,52
10	Kota Ambon	17,71	18,17	18,86	19,17	19,50	19,95	20,37	20,80	21,28	19,53
11	Kota Tual	15,03	15,45	16,19	16,63	17,18	17,64	18,15	18,65	19,26	17,13
	Provinsi Maluku	11,95	12,48	13,13	13,57	14,23	14,78	15,38	16,00	16,63	14,24

Sumber: BPS, Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019.

Tabel 4
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2018
(Persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	7,16	7,30	5,15	6,04	6,47	5,89	5,89	6,07	6,25
2	Kab. Maluku Tenggara	5,98	7,07	5,88	6,25	5,47	5,71	5,91	5,96	6,03
3	Kabupaten Maluku Tengah	5,40	6,91	4,46	6,58	5,30	5,94	5,81	5,94	5,79
4	Kabupaten Buru	5,44	5,44	4,42	6,23	5,23	5,72	6,01	6,22	5,59
5	Kabupaten Kep. Aru	5,25	7,84	5,88	6,84	5,19	5,25	5,92	6,05	6,03
6	Kab. Seram Bagian Barat	5,87	6,39	4,55	6,16	5,59	5,57	5,88	5,95	5,75
7	Kab. Seram Bagian Timur	8,54	3,94	3,15	8,44	5,72	5,03	3,34	0,38	4,82
8	Kab. Maluku Barat Daya	5,65	7,46	5,61	15,35	0,25	6,04	6,09	6,13	6,57
9	Kabupaten Buru Selatan	4,63	5,20	5,37	6,28	6,74	6,18	6,13	6,02	5,82
10	Kota Ambon	7,14	8,33	6,06	5,96	6,47	6,15	6,17	6,21	6,56
11	Kota Tual	5,90	7,90	5,90	6,34	5,62	5,81	5,74	5,98	6,15
Provinsi Maluku		6,34	7,16	5,26	6,70	5,67	5,85	5,80	5,69	6,06

Sumber: BPS, Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019.

Berdasarkan data pada tabel 3 dan 4, kita dapat membagi kabupaten/kota di Provinsi Maluku menjadi empat klasifikasi menurut Tipologi Klassen seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen

No	Kabupaten/Kota	Rerata PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Rerata Pertumbuhan (%)	Klasifikasi Daerah
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	11,60	6,25	Daerah Maju tapi Tertekan
2	Kab. Maluku Tenggara	15,20	6,03	Daerah Berkembang Cepat
3	Kabupaten Maluku Tengah	12,12	5,79	Daerah Relatif Tertinggal
4	Kabupaten Buru	9,55	5,59	Daerah Relatif Tertinggal
5	Kabupaten Kep. Aru	19,16	6,03	Daerah Berkembang Cepat
6	Kab. Seram Bagian Barat	8,92	5,75	Daerah Relatif Tertinggal
7	Kab. Seram Bagian Timur	15,46	4,82	Daerah Berkembang Cepat
8	Kab. Maluku Barat Daya	11,09	6,57	Daerah Maju tapi Tertekan
9	Kabupaten Buru Selatan	11,52	5,82	Daerah Relatif Tertinggal
10	Kota Ambon	19,53	6,56	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
11	Kota Tual	17,13	6,15	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
Provinsi Maluku		14,24	6,06	

Sumber: BPS, Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019 (Data diolah).

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan di atas nilai rata-rata pendapatan dan

pertumbuhan Provinsi Maluku (*high income and high growth*) yakni Kota Ambon dan Kota Tual dan sebaliknya daerah kabupaten/kota yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan di bawah nilai rata-rata pendapatan dan pertumbuhan Provinsi Maluku (*low income and low growth*) yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan.

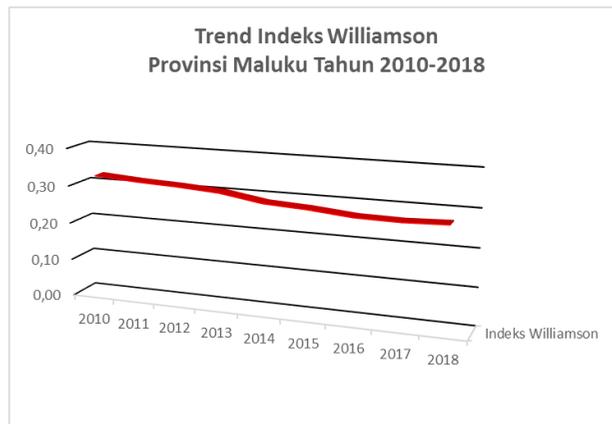
Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungannya dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika Indeks Ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Maluku adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Hasil analisis ketimpangan pendapatan dengan menggunakan Indeks Williamson di Provinsi Maluku 2010-2018, dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Maluku
Tahun 2010 - 2018

Tahun	Indeks Williamson
2010	0,32
2011	0,32
2012	0,31
2013	0,30
2014	0,29
2015	0,28
2016	0,27
2017	0,27
2018	0,27

Sumber: Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019 (Data diolah).



Hasil analisis menunjukkan ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 relatif rendah dan berfluktuatif. Trend perkembangan Indeks Williamson Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai dengan 2018 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas/ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku semakin membaik atau merata. Hal ini disebabkan antara lain penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Provinsi Maluku, dimana salah satu komponen desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan adalah dana perimbangan yang diberikan kepada daerah.

Tabel 7
Perkembangan Dana Perimbangan
Provinsi Maluku Tahun 2010-2018

Tahun	Dana Perimbangan		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2010	77.583.691	75.091.024	96,79
2011	77.583.691	75.091.024	96,79
2012	91.146.641.105	91.350.628.092	100,22
2013	91.146.641.105	91.350.628.092	100,22
2014	68.068.519.650	74.535.171.405	109,50
2015	2.069.530.985.000	1.741.775.127.819	84,16
2016	2.089.022.267.000	2.081.103.610.675	99,62
2017	2.440.447.167.932	2.370.129.513.532	97,12
2018	2.666.861.928.678	2.599.439.395.859	97,47

Sumber: Maluku Dalam Angka 2011 - 2019.

Dana perimbangan untuk Provinsi Maluku setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti sehingga menurunkan tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Maluku.

Tingkat ketimpangan yang tinggi terjadi karena kegiatan perekonomian maupun pembangunan hanya berpusat di beberapa wilayah saja, seperti Kota Ambon dan Kota Tual sebagai ibukota, akibatnya beberapa wilayah maju pesat sedangkan yang lainnya

tidak. Keseriusan pemerintah Provinsi Maluku untuk mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai program pemerintah daerah seperti revitalisasi tata kelola pemerintahan, optimalisasi pengelolaan SDA, penataan ruang, lingkungan hidup dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugusan pulau secara merata, peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul. Selain itu pembangunan Trans Maluku, program pengembangan Dok Wayame, pelabuhan ekspor Tulehu – Waai, pembangunan sektor perikanan, pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru, pembangunan Bandara Banda dan berbagai program atau kebijakan lainnya yang dapat menurunkan disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku secara signifikan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku diperoleh temuan studi sebagai berikut:

1. Tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2010-2018 yang dibagi ke dalam empat kuadran, yaitu kuadran I tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi pula didominasi oleh Kota Ambon, dan Kota Tual; kuadran II yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi rendah tetapi laju pertumbuhan PDRBnya tinggi didominasi oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Di kuadran ketiga dimana pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kep. Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Dikuadran keempat dimana merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan.
2. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 cukup rendah yaitu rata-rata di 0,29 yang menandakan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya tinggi di atas rata-rata Provinsi Maluku.

Daftar Pustaka

- Adisasmitha, R. 2009. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Makassar, Indonesia: Seruni com.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 3. Yogyakarta. STIE YKPN BPFE.
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Maluku Dalam Angka 2015*. BPS Provinsi Maluku.
- . 2019. *Maluku Dalam Angka 2019*. BPS Provinsi Maluku.
- Dhyatmika, Ketut Wahyu, dan Atmanti, Dwi Hastarini. 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran*. *Diponegoro Journal of Economic*. Vol.2 No.2.
- Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.